

**PERAN PEMIMPIN LOKAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA LIMPUNG
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA
TENGAH**

Dewi Rahmi Wahyuningsih
NPP. 31.0439
Asdaf Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email : dewirahmi2000@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Arwanto Harimas Ginting, S.STP, M.Si

ABSTARCT

Problem Statement (GAP): *Development planning is an important thing because in preparing a development plan this planning is used as a guide or reference. If development planning is not optimal then development will be difficult to realize. Lack of community involvement, ineffective coordination between village officials, lack of adequate resource allocation are the main problems that exist in development planning.* **Purpose:** *The aim of this research is to describe and analyze the role of the village head in improving the quality of village development planning in Limpung Village, Banyuputih District, Batang Regency, Central Java Province.* **Method:** *This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The data collection technique uses data triangulation techniques, namely observation, interviews, documentation with 7 informants with data analysis according to Miles and Huberman.* **Results:** *The Village Head has carried out his role well by realizing developments that have been implemented such as improving village facilities and infrastructure, building roads, tackling stunting and so on.* **Conclusion:** *The role of the Village Head in administering the government of the development planning process in Limpung Village is going quite well even though the results have not yet reached optimal results. Optimizing the role of the village head is very important so that development that has not been implemented can be completed in accordance with plans and objectives.*

Keywords: *Role, Local Leaders, Development Planning*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Perencanaan Pembangunan merupakan hal yang penting karena dalam menyusun suatu rencana pembangunan perencanaan ini sebagai pegangan atau acuan. Jika perencanaan pembangunan tidak maksimal maka pembangunannya pun sulit untuk terealisasikan. Kurangnya keterlibatan masyarakat, ketidakefektifan koordinasi antar perangkat desa, kurangnya alokasi sumber daya yang memadai merupakan permasalahan utama yang ada dalam perencanaan pembangunan. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

dan menganalisis peran kepala desa dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa di Desa Limpung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi data, yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi dengan 7 informan dengan analisis data menurut Miles and Huberman. **Hasil/Temuan:** Kepala Desa sudah menjalankan perannya dengan baik dengan diwujudkan pembangunan yang sudah terlaksana seperti perbaikan sarana dan prasarana desa, pembangunan jalan, penanganan stunting dan lain sebagainya. **Kesimpulan:** Peranan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dari proses perencanaan pembangunan di Desa Limpung berjalan cukup baik walaupun hasilnya belum mencapai hasil yang optimal. Pegoptimalan peran kepala desa sangat penting agar pembangunan yang belum terlaksana dapat terselesaikan sesuai dengan perencanaan dan tujuannya.

Kata Kunci : Peran, Pemimpin Lokal, Perencanaan Pembangunan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional sendiri dimulai dari pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif masyarakat desa sebab desa ini adalah salah satu indikator di dalam tercapainya pembangunan nasional. Menurut Marbun (2000), mengemukakan desa perlu digarap pembangunannya dengan baik karena tidak akan terlaksananya pembangunan nasional jika pembangunan desa sendiri tidak dibenahi dan tidak dilaksanakan. Amanat dari pemerintah pusat tersebut dalam pelaksanaan atas segala urusan pemerintah dilaksanakan oleh kepala daerah, perangkat daerah serta DPRD (Kuddy, 2018).

Pemerintahan desa adalah suatu entitas sebagai pelopor pembangunan sebab mempunyai hubungan yang erat terhadap masyarakat desa (Numan, 2013). Agar semakin mempertegas visi dan misi dari pembangunan manusia seutuhnya maka prinsip pembangunan partisipatif perlu dijadikan acuan. Maka dari itu, untuk tercapainya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera perlu penegasan eksistensi desa agar hak-hak desa semakin kuat dengan bersandar kepada kearifan lokal masyarakat.

Dalam rangka mengukur perkembangan kemajuan dan kemandirian desa dalam pembangunan, pemerintah membentuk IDM (Indeks Desa Membangun). IDM ini merupakan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta pendamping desa. IDM ini termuat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 8 yaitu indeks komposit yang meliputi indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Kemudian yang menjadi lokus penelitian adalah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang.

Berdasarkan IDM status desa di Kabupaten Batang jumlah desa mengalami peningkatan dan penurunan, berikut tabel yang bisa dilihat :

Tabel 1. 1
Status Desa Hasil Pemutakhiran IDM Tahun 2018 - 2023

NO	STATUS DESA	JUMLAH (PER TAHUN)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	MANDIRI	0	1	0	0	0
2	MAJU	20	32	41	49	63
3	BERKEMBANG	162	192	190	184	172
4	TERTINGGAL	56	14	8	6	4
5	SANGAT TERTINGGAL	1	0	0	0	0

Sumber : IDM Kabupaten Batang, 2022

Berdasarkan tabel 1.1, terdapat 239 desa dengan status yang berbeda di Kabupaten Batang. Dari data tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 desa yang dikategorikan sebagai desa mandiri hanya 1 desa yaitu Desa Subah. Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan 2022 jumlah desa dengan status desa maju yang ada di Kabupaten Batang mengalami peningkatan secara signifikan. Kemudian pada tahun 2018-2019 desa dengan status desa berkembang mengalami peningkatan jumlah desa yaitu dari 162 ke 192 desa. Desa dengan status berkembang ini pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan jumlah desa. Penurunan jumlah desa diakibatkan karena ada beberapa desa yang status desa berkembang berubah menjadi status desa maju. Sedangkan untuk status desa tertinggal mengalami penurunan jumlah desa dari 2018 sampai dengan 2022. Dan dimana desa dengan status desa sangat tertinggal ini hanya terdapat satu desa yaitu desa Posong pada tahun 2018.

Sejak dikeluarkan anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa kegunaan anggaran dana desa dalam pembangunan ini sangat bermanfaat bagi keberlangsungan pembangunan yang ada di desa (Steven, 2023). Tetapi berdasarkan IDM Kabupaten Batang setelah dilakukan pengamatan bahwa sudah ada desa yang memang berstatus maju sejak tahun 2016 yang mana belum dikeluarkan anggaran dana desa ini. Untuk itu peneliti mencoba mengambil beberapa desa dengan status maju di Kabupaten Batang.

Tabel 1. 2**IDM Desa di Kabupaten Batang**

DESA	NILAI IDM 2016	IDM 2016	NILAI IDM 2018	IDM 2018	NILAI IDM 2019	IDM 2019	NILAI IDM 2020	IDM 2020	NILAI IDM 2021	IDM 2021	NILAI IDM 2022	IDM 2022
Bandar	0,7351	MAJU	0,7595	MAJU	0,7948	MAJU	0,7992	MAJU	0,8011	MAJU	0,8011	MAJU
Bawang	0,7618	MAJU	0,786	MAJU	0,7413	MAJU	0,7279	MAJU	0,7448	MAJU	0,7524	MAJU
Limpung	0,7543	MAJU	0,7406	MAJU	0,7502	MAJU	0,7746	MAJU	0,786	MAJU	0,8141	MAJU
Sempu	0,7399	MAJU	0,7252	MAJU	0,7124	MAJU	0,7851	MAJU	0,7851	MAJU	0,7851	MAJU
Tersono	0,7340	MAJU	0,7598	MAJU	0,7976	MAJU	0,81	MAJU	0,7865	MAJU	0,7973	MAJU

Sumber: IDM Kabupaten Batang, 2022

Berdasarkan tabel 1.2, dari 239 desa yang ada di Kabupaten Batang peneliti mendata bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2022 terdapat 5 desa yang sudah mencapai status desa maju yaitu Bandar, Bawang, Limpung, Sempu, dan Tersono. Tetapi dari 5 desa dengan indikator desa maju tersebut yang memiliki IDM yang paling tinggi adalah Desa Limpung. IDM Desa Limpung dari tahun 2016 ke 2018 mengalami penurunan tetapi tidak begitu besar. Dan pada tahun 2018 sampai dengan 2022 IDM Desa Limpung terus meningkat dan pada tahun 2022 IDM Desa Limpung mendapatkan IDM desa tertinggi daripada 4 desa lainnya yaitu mencapai 0.814

Tabel 1. 3
IKS, IKE, IKL Desa Limpung

Limpung	2016	2018	2019	2020	2021	2022
IKS	0,8873	0,7886	0,8171	0,8571	0,8914	0,9257
IKE	0,7089	0,8333	0,7667	0,8000	0,8000	0,8500
IKL	0,6667	0,6000	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667
Nilai IDM	0,7543	0,7406	0,7502	0,7746	0,7860	0,8141

Sumber : Diolah Penulis dari IDM Kabupaten Batang

Berdasarkan table 1.3, IDM tiap desa terdiri dari 3 indikator yaitu IKS, IKE, dan IKL. IKS (Indeks Ketahanan Sosial) meliputi pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman.

Untuk nilai IKS Desa Limpung dari tahun 2018 - 2022 cenderung meningkat. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) meliputi keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit dan keterbukaan wilayah. Nilai IKE Desa Limpung pada tahun 2016-2022 berbeda-beda tetapi pada tahun 2022 mencapai nilai IKE tertinggi daripada tahun sebelumnya. Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan (IKL) meliputi kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana. Untuk nilai IKL Desa Limpung cenderung tetap tidak mengalami perubahan dan terdapat penurunan hanya pada tahun 2018.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemimpin lokal secara umum dapat dikategorikan menjadi pemimpin lokal formal dan pemimpin lokal informal. Pemimpin lokal formal adalah Kepala Desa dan ketua BPD sedangkan pemimpin lokal informal adalah tokoh adat, tokoh masyarakat dan elit-elit-elit lokal yang lain (Husein, M Bustanol, 2021). Salah satu pemimpin lokal yang akan dibahas oleh peneliti pada penelitian ini adalah Kepala Desa. Kepala Desa merupakan pemimpin lokal desa yang perannya sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 372 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan melaksanakan pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan tugas tersebut pemerintah Desa mendapatkan dana anggaran dari pemerintah daerah yang dibebankan kepada APBD.

Indikator IDM terdiri dari IKS, IKE dan IKL. Desa Limpung ini memiliki nilai IKL yang rendah diantara indikator IDM lainnya (IKS dan IKE). Dari data nilai IDM terutama IKL terlihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 masih mempunyai nilai yang sama yaitu 0,6667. IKL merupakan nilai dari kualitas lingkungan, indikator rawan bencana dan indikator tanggap bencana. Diharapkan dengan adanya data IDM ini menjadi indikator kepala desa untuk merumuskan pembangunan di desa melihat dari data bahwa IKL dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 memiliki nilai yang sama. Hal ini memperlihatkan bahwa IKL belum menjadi salah satu prioritas pembangunan dari kepala desa yang terpilih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembangunan yang ada di Desa Limpung dan bagaimana dengan indikator dari IDM terutama indikator IKL yang nilainya tetap setiap tahunnya. Untuk itu dalam penelitian kami mengkaji mengenai peran pemimpin lokal terutama kepala desa dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa Limpung.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu baik. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah yang dilakukan Rizki Yuda Bramanty dkk membahas Pemerintah Desa Wates Kabupaten Kediri menggunakan perencanaan pembangunan partisipatif yaitu dengan melibatkan masyarakat di dalamnya. Dengan menggunakan teori perencanaan dari Alexander yaitu rencana merupakan rancangan sesuatu yang ingin dicapai. Dan konsep pembangunan menurut Simamora dan Sahroni. Permasalahannya pada perencanaan pembangunan ini terletak pada masyarakat desa seperti aspek sosial budaya desa misal perbedaan pendapat tokoh desa, sumber daya masyarakat yang relatif minim, rendahnya minat pendidikan, dan rendahnya pembangunan manusia (Bramantyo, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fiqri Hidayatulloh dan Muhammad Turhan Yani. Artikel ini membahas tentang peran tokoh masyarakat yang subjeknya terdiri dari Kepala Desa, ketua badan permusyawaratan desa dan ketua badan usaha milik desa. Dari penelitian ini peran yang dilakukan tokoh masyarakat adalah berpartisipasi aktif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDes), Menyusun anggaran untuk pembangunan desa, merealisasikan program kerja yang disusun, dan menjaring aspirasi masyarakat (Hidayatulloh & Yani, 2022).

Kemudian penelitian yang dilakukan Rizzka Aulia dkk membahas peran kepala desa dalam pembangunan yang mengambil teori peran menurut Henry Mintzberg yaitu 3 peranan utama adalah peran hubungan antarpribadi, peranan yang berhubungan dengan informasi dan peranan pengambilan keputusan. Peran Kepala Desa ini sudah cukup optimal dalam pembangunan Desa Kedawung tetapi terdapat juga permasalahan yang disebabkan pihak luar terkait dengan anggaran (Aulia, 2022). Artikel jurnal oleh Mikelson Amandus membahas bahwa peran Kepala Desa di Desa Nen Bura dalam proses perencanaan pembangunan sudah berjalan cukup baik tetapi dalam ketercapaian hasilnya masih belum optimal dan tidak sesuai harapan masyarakat karena masih terdapat jalan yang belum terealisasi dengan baik dan minimnya penerangan listrik. Teori peran yang dijelaskan hanya mengacu pada tugas Kepala Desa sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Amandus, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aeni, dkk yang membahas peran kepala desa dalam pembangunan Desa Bantar Kalong Kabupaten Sukabumi. Artikel ini menggunakan teori peran dari Sondang P Siagian yang terdiri dari 5 indikator yaitu stabilisator, innovator, pelopor, modernisasi dan pelaksana sendiri. Permasalahan dalam pembangunan Desa Bantarkalong ini dikarenakan belum tercapainya sasaran dan rendahnya partisipasi ataupun keterlibatan pemerintah desa (Aeni Nurul, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Lutiya Ningrum dkk yang membahas peran kepala desa terhadap pembangunan di Desa Wates Ponorogo. Kepala Desa dapat membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan sesuai dengan SDGs Desa (Lutiya, 2021). Penelitian yang dilakukan Selni Paru dkk dalam peran kepala desa untuk meningkatkan pembangunan desa di Desa Salibu . Bahwa Peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat ini masih kurang baik dan masyarakat pun belum meraskan peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat (Selni, 2019). Penelitian yang dilakukan Eli Sukmana yang membahas peranan kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peran kepala desa sudah optimal didalam melaksanakan perannya sebagai motivator, mediator dan perencanaan pembangunan sudah cukup baik. Masyarakat juga ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan maupun evaluasinya (Sukmana, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan latar belakang yaitu dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun untuk memilih lokus penelitian dan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam rumusan masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peran Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2004:217). Dimensi dasar dari teori ini adalah harapan, norma, wujud perilaku serta sanksi dan penilaian. Keempat dimensi tersebut akan dikaitkan dengan hasil wawancara yang didapatkan secara langsung dari para informan kepada penulis yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemimpin lokal Limpung tepatnya Kepala Desa. Selain itu teknik analisis milik Miles and Huberman yang sedikit digunakan oleh penelitian sebelumnya. Selain itu lokus penelitian juga berbeda dari penelitian terdahulu. Selain itu kondisi penelitian yang dilaksanakan pasca pandemi Covid-19 dimana keadaan proses pemulihan seluruh lini kehidupan pemerintah dan masyarakat dibangun kembali pasca dilanda pandemi tersebut . Sehingga penelitian ini menarik dan memiliki kebaruan ilmu.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa di Desa Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasil akhirnya berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis, perilaku atau perkataan dari orang sekitar yang diteliti (Sugiyono, 2022). Pendekatan yang dilakukan peneliti didalam menulis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menemukan dan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data secara visual dan naratif yang komprehensif agar mendapatkan suatu fenomena atau masalah yang menarik perhatian. Teknik pengumpulan data sendiri dengan data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Informan wawancara dilakukan dengan kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam melakukan analisis data kualitatif, melibatkan beberapa Langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengamati peran pemimpin lokal yang ada di Desa Limpung. Pemimpin lokal pada pelaksanaan pembangunan mempunyai peran sebagai agen pembangunan. Pemimpin lokal secara umum dapat dikategorikan menjadi pemimpin lokal formal dan pemimpin lokal informal. Pemimpin lokal formal adalah kepala desa dan ketua BPD sedangkan pemimpin lokal informal adalah tokoh adat, tokoh masyarakat dan elit-elit-elit lokal yang lain (Husein, M Bustanol, 2021). Pemimpin lokal yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah kepala desa. Sedangkan peran yang dimaksudkan adalah hubungan sosial antara pemimpin lokal yaitu kepala desa dengan masyarakatnya dalam mencapai tujuan pembangunan.

Kepala desa mempunyai wewenang dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dengan visi dan misi yang dipegangnya dalam memajukan pembangunan yang ada di desa. Kepala desa Limpung mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai penggerak dalam menciptakan pembangunan yang telah direncanakan dalam musrenbang dan juga sesuai dengan visi serta misinya. IDM Desa Limpung sendiri memiliki status desa maju. Dimana status indikator ini termasuk tinggi. Nilai dari IDM Desa Limpung juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berarti ini menandakan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Limpung sudah baik. Dilihat dari IDM tersebut terdapat salah satu indikatornya yaitu IKL mengalami nilai yang tetap pada setiap tahunnya yaitu 0,667. Tentunya peran kepala desa sangat dibutuhkan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Desa terutama permasalahan yang berdampak pada pembangunan. Pilihan yang bisa dilakukan adalah yang pertama dengan kegiatan peran kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa dan kedua adalah dengan peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan.

A. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Perencanaan Pembangunan

Pondasi dasar dari penelitian ini adalah penelitian yang diterapkan oleh penulis teori Biddle dan Thomas (dalam Sarwono,2015:215) terdapat beberapa istilah tentang perilaku yang disebabkan oleh adanya peran.

o Harapan (*expectation*)

Harapan merupakan indikator yang harus ada dalam melaksanakan peran dalam menjalankan pembangunan yang ada. Harapan ditunjukkan oleh orang lain kepada

seseorang yang mampu berperan dalam berperilaku yang pantas. Harapan masyarakat sendiri kepada kepala desa sebagai salah satu dari pemimpin lokal yang memegang peran dalam pembangunan. Masyarakat berharap kepala desa menangani permasalahan pembangunan yang ada seperti memperbaiki jalan yang rusak, membangun saluran air agar tidak terjadi banjir, membangun lapangan pekerjaan dan membangun infrastruktur lainnya. Kepala Desa Limpung juga berharap bahwa masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk membangun pembangunan desa. Utamanya dalam perencanaan pembangunan, diharapkan apa saja yang menjadi masalah di dalam pemerintahan desa pada lingkungan masyarakat bisa teratasi seluruhnya. Dimana perencanaan pembangunan ini menentukan pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa.

○ **Norma (Norm)**

Norma adalah salah satu indikator yang dijadikan dalam menilai pelaksanaan peran kepala desa. Norma adalah salah satu indikator yang dijadikan dalam menilai pelaksanaan peran kepala desa. Harapan yang memiliki keterkaitan dengan posisi atas status seorang kepala desa yang berwenang dalam membuat perencanaan pembangunan desa adalah sebab dari indikator tersebut bisa dijadikan landasan untuk meninjau bagaimana nilai dan norma kepala desa sebagai sosok pemimpin. Norma ini adalah suatu bentuk dari harapan. Harapan yang bersifat meramalkan yaitu perilaku yang akan terjadi dan harapan yang bersifat normatif yaitu keharusan yang menyertai peran.

Harapan yang meramalkan perilaku yang akan terjadi contohnya dalam kepala desa Limpung diberikan harapan oleh masyarakat desa Limpung agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan desa menjadi desa mandiri dan sejahtera. Tentunya harapan tersebut harus bisa terwujud jika kepala desa dan masyarakat saling membantu dan berpartisipasi serta gotong royong didalam pembangunan desa.

Kemudian harapan yang bersifat keharusan dalam sebuah peran. Menurut Secord dan Backman (dalam Sarwono, 2015:217-218), harapan disini terbagi menjadi dua yaitu harapan tersembunyi dan harapan transparansi. Harapan tersembunyi harapan yang ada tetapi tidak terucapkan. Seperti harapan yang diberikan kepada kepala desa oleh masyarakat agar memperbaiki pembangunan seperti jalan maupun jembatan yang sudah tidak layak. Sedangkan harapan transparansi adalah harapan yang terucap. Misalnya masyarakat menyampaikan aspirasi masyarakat pada saat pelaksanaan musyawarah desa yang dipimpin kepala desa dan BPD.

○ **Wujud Perilaku**

Dalam teori Thomas dan Biddle yang dimensi yang ketiga merupakan performance atau wujud perilaku. Pada indikator ini jika dihubungkan dengan posisi atas status kepala desa yang mempunyai andil dan kontribusi terhadap pembangunan baik dari perencanaan maupun pendanaan pelaksanaan pembangunan di Desa Limpung merupakan sebab dari indikator tersebut dapat dijadikan landasan agar meninjau bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan secara nyata. Pencapaian yang diwujudkan kepala desa sebagai pemimpin lokal desa yaitu : (1) bidang Kesehatan : penyuluhan pin polio, penyuluhan masalah stunting sehingga di Desa Limpung tidak ada yang mengalami stunting, penyemprotan foging dilingkungan desa (2) bidang sarana dan prasarana : pemberian bantuan jamban bagi masyarakat yang belum mempunyainya dan penyediaan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima dan (3) bidang ekonomi seperti menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dimana dalam pelaksanaan pembangunan desa pemerintah desa mengambil masyarakat setempat sebagai pekerjanya.

○ **Penilaian dan Sanksi (*Evaluation and Sanction*)**

Pada teori Biddle & Thomas dimensi yang keempat adalah evaluasi. Penilaian peran dilakukan dengan cara memberikan kesan positif ataupun negatif kepada Kepala Desa berdasarkan harapan masyarakat terhadap peran Kepala Desa yang dituju. Penilaian dilakukan agar dapat mengetahui apakah kepala desa sudah maksimal atau belum dalam melaksanakan perannya. Jika hasil penilaian menghasilkan kesan negatif maka setelahnya akan diberikan sanksi. Di Desa Limpung sendiri Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan sudah cukup baik dilihat dari peran kepala desa yang dijalankan dengan baik walaupun masih ada kendala dari penertiban pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan di seputaran alun-alun kota Limpung walaupun sudah dibangun pugasera sebagai tempat berjualan sehingga merusak makna dari ruang terbuka hijau dari sebuah alun-alun. Tetapi hal tersebut disebabkan juga karena kurangnya sosialisasi dari kepala desa tentang pembangunan pugasera dan kepatuhan dari masyarakat dirasa kurang.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan perencanaan pembangunan di Desa Limpung adalah perwujudan pengelolaan dana dari desa terhadap keberhasilan membangun pembangunan yang efektif di masyarakat Desa Limpung baik pelaksanaan pembangunan lingkungan maupun ekonomi serta dukungan yang berupa kebijakan dari pemerintah yang diimplementasikan kepada realisasi APBD untuk tercipta pembangunan yang terarah dan mempunyai manfaat untuk masyarakat. Faktor pendukung ini dibagi menjadi 2 yaitu :

○ **Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang ada dari dalam suatu organisasi. Faktor internal dapat memberikan dampak pada perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan. Yang merupakan faktor internal tersebut merupakan SDM dari aparatur pemerintahan desa. perangkat desa sudah bagus dalam bekerja yang sudah mampu mengaplikasikan TIK atau teknologi Informasi Komputer sehingga mampu mempercepat pekerjaan sehingga waktu bekerja lebih cepat dan efisien. Kemudian faktor internal lain yaitu mampu mendukung kinerja Kepala Desa ketika perencanaan pembangunan dengan ikut serta dalam pengelolaan anggaran dan ikut terjun langsung meninjau pelaksanaan pembangunan. Dan selalu mengadakan evaluasi setiap seminggu sekali untuk mengevaluasi permasalahan yang dihadapi pemerintah desa. Tujuannya adalah untuk membahas tentang perencanaan pembangunan serta progres dari pembangunan yang berjalan

○ **Faktor eksternal** merupakan berasal dari dorongan kontribusi masyarakat desa. beberapa bentuk kontribusi dari masyarakat Desa Kedawung adalah dengan menyalurkan aspirasi pada setiap tahapan perencanaan. Pada saat musyawarah rencana pembangunan Desa berlangsung, apakah ada keaktifan dari masyarakat yang menyalurkan aspirasi yang dibuktikan dengan masyarakat yang menyampaikan pendapat mereka tentang kebutuhan masyarakat pada beragam sektor baik sektor pendidikan, ekonomi, maupun Kesehatan yang pastinya mempengaruhi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah dari perencanaan pembangunan sendiri diantaranya kualifikasi SDM dari sisi kompetensi, skill serta inisiatif yang digambarkan dari kinerja SDM itu sendiri. Minimnya kualitas SDM yang ada di Desa Limpung untuk mempengaruhi perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan maka dari itu meningkatkan kualifikasi SDM pada aparatur pemerintahan sangat dibutuhkan agar desa dapat meningkatkan skill pada masing-masing bidang searah dengan rumpun ilmu yang relevan dengan berbagai macam pekerjaan di Desa.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan

Upaya untuk mengatasi faktor hambatan dari pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Limpung oleh Kepala Desa bahwa terkait dengan kualifikasi SDM yang masih rendah. Upaya yang bisa dilakukan agar dapat menanggulangi hal tersebut haruslah memerlukan regenerasi dari SDM yang ada. Agar dapat menghasilkan kualifikasi sumber daya manusia yang mempunyai kualitas tentunya diperlukan rekrutmen dan seleksi yang objektif yang diterapkan dengan beberapa tes yang dapat mengukur kompetensi serta keterampilan yang dimilikinya.

Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan agar keterlambatan dari pencairan anggaran yang menimbulkan pembangunan terkendala. Permasalahan tersebut bergantung pada kemampuan kepala desa yang seharusnya bisa bersinergi dengan bendahara agar bisa mengatur keuangan. Selain itu kepala desa bisa mencari dana tambahan untuk pelaksanaan pembangunan dengan menambah pemasukan anggaran dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bantuan Keuangan ataupun bisa membangun BUMDes maupun koperasi desa. Pelaksanaan pembangunan seperti membangun saluran irigasi, jalan, pujasera dan tempat lainnya juga memanfaatkan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) dari masyarakat setempat agar bisa membantu perekonomian masyarakat setempat juga. Dengan memanfaatkan SDM masyarakat desa bisa mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa yang tidak bekerja.

3.1. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan bahwa peran Kepala Desa dalam peningkatan perencanaan pembangunan desa di Desa Limpung berjalan dengan cukup baik. Hal ini tidak lepas dari aparat pemerintahan desa dan masyarakat yang melakukan dan melaksanakan segala bentuk urusan pemerintahan desa. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ely Sukaman bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan sudah berjalan cukup baik di Desa Aikmel NTB. Hasil dalam penelitian ini teori peran dari harapan, Masyarakat berharap kepala desa menangani permasalahan pembangunan yang ada seperti memperbaiki jalan yang rusak, membangun saluran air agar tidak terjadi banjir, membangun lapangan pekerjaan dan membangun infrastruktur lainnya. Kemudian norma, pembangunan yang berkaitan sarana dan prasarana jalan dapat terealisasi nyata dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat sehingga mampu menciptakan norma kesusilaan yang baik dimata masyarakat terhadap Kepala Desa. Selanjutnya pengelolaan dana atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut tentunya menggambarkan norma hukum dan norma kesusilaan. Peran kepala desa selanjutnya adalah wujud perilaku, kepala desa yang mempunyai andil dan kontribusi terhadap pembangunan baik dari perencanaan maupun pendanaan pelaksanaan pembangunan di Desa Limpung merupakan sebab dari indikator tersebut dapat dijadikan landasan agar meninjau bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan secara nyata. Selanjutnya yang terakhir adalah penilaian dan sanksi. Kepala desa yang menjalankan pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan dinilai cukup optimal meskipun ada beberapa perencanaan belum terlaksana. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat maupun perangkat desa sendiri jika melanggar pelaksanaan pembangunan adalah dengan teguran.

3.2. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa perencanaan pembangunan didukung oleh perangkat desa mendapat pelatihan khusus seperti sosialisasi peningkatan kapasitas aparatatur perangkat desa, sosialisasi desa sadar hukum, pelatihan komputer, sosialisasi sadar narkoba bagi remaja. Dan ditemukan beberapa hambatanya sendiri seperti terkendala pergantian kepemimpinan, adanya kepentingan pribadi dan anggaran dana desa.

IV. KESIMPULAN

Peran Kepala Desa Dalam Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Limpung, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa Pembangunan di Desa Limpung sudah terencana terlebih dahulu terkait dengan program pelayanan umum dan program pelayanan dasar. Perencanaan pembangunan dilaksanakan secara musyawarah yang menghadirkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan perwakilan dari masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan transparan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunannya. Faktor yang mendukung dan menghambat peran Kepala Desa dalam perencanaan peningkatan kualitas pembangunan desa ialah faktor pendukungnya terdiri dari faktor internal yaitu kinerja kepala desa dan perangkat desa yang mampu bekerja dengan memanfaatkan TIK dan faktor eksternal dari faktor pendukung itu sendiri adalah kontribusi dari masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasi pembangunan desa.

Sedangkan faktor penghambat dari peran Kepala Desa adalah minimnya kualitas SDM yang ada di Desa Limpung untuk mempengaruhi perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan hambatan dalam pencairan anggaran desa yang diperoleh secara bertahap. Dan salah satu upaya lain adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif di dalam perencanaan pembangunan dengan mensosialisasikan pentingnya perencanaan pembangunan untuk menentukan keberhasilan tujuan dari pembangunan desa.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang ada Di Desa Limpung, dan bagaimana meningkatkan dan melaksanakan semua perencanaan pembangunan yang telah di susun.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Limpung beserta jajaran pemerintahan Desa Limpung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, Dosen Pembimbing, Orang Tua dan Keluarga, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

- Numan, A. (2013). Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. *Jurnal Pembangunan* 12. <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/governance/article/view/311/0>. Diakses 25 September 2023.
- Marbun. (2000). *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*. Surabaya : Erlangga.
- Kuddy, A. L. (2018). Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Kabupaten Paniai. *Jurnal Manajemen*, 2(1), 19–26. <https://jurnal.man.feb.uncen.ac.id/index.php/jmb/article/view/15>. Diakses 28 September 2023.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Bramantyo, R. Y. (2022). Peran Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah

- Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(1), 152–167. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/3632%0Ahttp://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/3632/2435>. Diakses 10 Oktober 2023.
- Hidayatulloh, M. F., & Yani, M. T. (2022). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(3), 540–554. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3.p540-554>. Diakses 21 Oktober 2023
- Aulia, R dkk. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kedawung. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis* 9(9), 3184–3192. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>. Diakses 22 Oktober 2023
- Amandus, M. (2022). Analisis Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Nen Bura. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 727–730. <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.259>. Diakses 25 Juli 2023.
- Aeni, Nurul dkk. (2023). Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10, 3569–3575. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/12119> Diakses 22 Oktober 2023
- Ningrum, Lutiya dkk. (2021). Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Administrasi dan Pembangunan*. <http://eprints.umpo.ac.id/3819/1/Artikel%202.1A.pdf> Diakses 24 Oktober 2023
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Paru, Selni dkk. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/24517> diakses 20 Oktober 2023
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2015). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sukmana, Ely. (2019). Peranan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*. <https://ejournal.ipdn.ac.id> Diakses 20 Oktober 2023.
- Charel, Steven. (2023). Arah Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2024. <https://bumibahari.digitaldesa.id/berita/arah-kebijakan-prioritas-penggunaan-dana-desa-2024> Diakses 02 februari 2023
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

